

Dalam bidang agama selanjutnya ia mengatakan:

Dan agama juga membeku seperti hal-hal lain. Ketauchidan yang diajarkan oleh Muhammad s.a.w. telah diselubungi churofat dan faham kesufian. Mesjid-mesjid ditinggalkan oleh golongan besar yang awam. Mereka menghias diri dengan azimat, penangkal penyakit dan tasbih. Mereka belajar dari Fakir dan Darwis dan menziarahi kuburan "orang keramat". Mereka menyembah orang itu sebagai manusia suci dan "perantara" dengan Allah karena menganggap dia begitu jauh bagi manusia biasa untuk pengabdian langsung. Orang sudah awam akan akhlak yang diajarkan oleh Al-Quran atau tak menghiraukannya.²

Dari uraian diatas kiranya dapat digambarkan bahwa kehidupan politik umat Islam telah lenyap meninggalkan ritus tak bernyawa dan umat Islam telah merasakan kemundurannya. Kemudian Charles C. Adams dalam bukunya "Islam dan dunia modern di Mesir" beliau mengatakan :

"Umat Islam sedang dalam kemunduran yang sangat. Dari sudut politik sebagian besar umat Islam dijajah oleh kerajaan-kerajaan yang bukan Islam, dimana-mana yang tidak langsung di bawah kekuasaan asing setidaknya-tidaknya ada pengaruhnya. Keadaan sosial, moral dan intelektual mereka sama menyedihkan, mereka dihindangi oleh berbagai penyakit, menjadi berupa-rupa adat yang berbahaya yang bukan pengajaran Islam yang benar dan kelalaian mereka mengamalkan sekedar yang mereka ketahui.

Demikianlah keadaan umat Islam pada abad XVIII dan abad XIX sedang mengalami kemunduran, tetapi kelak kita mau menengok lebih jauh lagi, maka sesungguhnya kemunduran umat Islam telah mulai nampak

¹Lothrop Stoddart, "The New Word Of Islam" terjemahan, tanpa nama penerbit, Jakarta 1966 hal. 29
²ibid, halaman 29 - 30
 Charles C. Adams, Islam dan Dunia Modern di Mesir, Dian Rakyat, Jakarta, halaman 109

sejak datangnya Turki menyerbu Baghdad dan menyebar ke seluruh penduduknya, dan menghancurkan kebudayaan Islam dirampas oleh bangsa Mongol Turki Usmani yang meskipun mereka kuat dalam bidang militer, tetapi kurang memperhatikan ilmu pengetahuan.⁴

Mengenai sebab-sebab kemunduran yang menimpa kepada umat Islam ini, sebagian para ahli berpendapat hal itu disebabkan karena suatu anggapan bahwa pintu ijtihad telah tertutup⁵ dan mencukupkan diri dengan pusaka pikiran yang diwariskan oleh imam empat (Maliki, Hanafi, Hambali dan Syafii). Murid-murid dari empat imam ini menganjurkan untuk hidup dengan apa yang telah ada. Namun kerugian terbesar umat Islam, yang akan dirasakan berabad-abad lamanya ialah matinya kehidupan berfikir dan keberanian mengambil suatu prakarsa, lebih-lebih dalam dalam bidang hukum. Taqlid merajalela, kebodohan merata dan keyakinan umat Islam akan agamanya menjadi beku. Kekacauan dalam sistem hukum telah merusak kesegaran pikiran dan kemauan untuk lebih maju dalam segala bidang kehidupan. Dan ditengah kekalutan taqlid itulah penjajahan asing menyerbu dan menjadikan kebobrokan umat Islam. Akhirnya umat Islam menjadi mundur.

Demikianlah gambaran dunia Islam pada umumnya, selanjutnya kita beralih pada dunia Islam yang lain yaitu Mesir beserta kondisi politik negara itu.

Setelah bertambah lemahnya kekuasaan sultan-sultan Turki di abad ke tujuh belas, Mesir yang sejak 1517 ditaklukkan oleh sultan Salim, mulai melepaskan diri dari kekuasaan Istanbul dan akhirnya menjadi daerah otonom.

⁴Philip R. Hitti, The Arabs A Short History,
 terjemahan⁵ Usuludin Hutagalung dan ODP. Sihombing.
⁵L. Stoddar, op. cit., halaman 300

Sultan-sultan Usmani tetap mengirim seorang pasya Turki ke Kairo yang bertindak sebagai wakil mereka dalam memerintah daerah ini. Tetapi karena kekuasaan sebenarnya ada ditangan kaum mamluk, kedudukannya di Kairo tidak lebih dari kedudukan seorang Duta Besar.⁶

Kaum mamluk berasal dari budak-budak yang dibeli dari Kaukasus, suatu daerah pegunungan yang terletak didaerah perbatasan antara Rusia dan Turki. Mereka dibawa ke Istanbul atau ke Kairo untuk diberi didikan militer, dan dalam dinas kemiliteran kedudukan mereka meningkat dan diantaranya ada yang mencapai jabatan militer yang tinggi.

Setelah jatuhnya prestise sultan-sultan Usmani, mereka tidak lagi mau tunduk kepada Istanbul bahkan menolak pengiriman hasil pajak yang mereka pungut dengan secara kekerasan dari rakyat Mesir ke Istanbul. Kepala mereka disebut Syeikh Al-Balad dan Syeikh inilah yang sebenarnya menjadi Raja di Mesir pada waktu itu. Karena mereka bertabiat kasar biasanya hanya tahu bahasa Turki dan tak pandai berbahasa Arab, hubungan mereka dengan rakyat Mesir tidak begitu baik.⁷

Tiba-tiba pada tahun 1798 mendaratlah tentara Napoleon di Mesir. Negeri itu didudukinya dengan tidak memberitahukan atau memaklumkan perang terlebih dahulu kepada kerajaan Usmani.⁸

Dengan memimpin pasukan perang dalam jumlah banyak, berperlengkapan komplit, Bonaparte bergerak maju ke Mesir. Armada Perancis meninggalkan Toulun pada awal mula musim panas tahun 1798 M, menaiki kapal bala bantuan dari Italy, menguasai Malta pada bulan

⁶Harun Nasution, Pembaharuan Dalam Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1975 halaman 29
⁷ibid, halaman 29
⁸Dr. Hamka, Sejarah Umat Islam III, Bulan Bintang Jakarta, Cet. ke IV 1981 halaman 293

Juni, tiba di Mesir pada bulan Juli dan memasuki Iskandari pada hari berikutnya. Dia mengalahkan mamluk di Embaba daerah sekitar Kairo, yang ia masuki pada bulan Juli. Gubernur Ottoman (pen. Usmani) Ibrahim Bey dan pengikut-pengikut mamluk melarikan ke Syria. Murai Bey mencari perlindungan di upper Mesir dan mulai mengganggu Perancis yang dipaksa untuk mengangkat dirinya sebagai Gubernur daerah ini dengan dibawah kekuasaan Perancis.⁹

Kedatangan Napoleon ke Mesir tidak hanya membawa tentara Angkatan Perang saja melainkan juga orang-orang sipil dan wanita. Diantara mereka terdapat para ahli dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan. Napoleon juga membawa alat-alat percetakan dalam huruf Arab, Latin dan Yunani. Disamping itu ia juga mendirikan lembaga ilmiah bernama - " Institute D egypte " yang meliputi beberapa bidang ilmu : Ilmu Pasti, Ilmu Alam, Ekonomi politik dan bidang Ilmu Sastera dan Seni.

Agar dapat mengambil simpati penduduk Mesir, Bonaparte memilih 10 orang sebagian besar dari Al-Azhar, untuk membentuk sebuah Diwan (Diwan Al-Ummah) dengan Rektor Al-Azhar, Syeikh Abdullah Sharqawi sebagai pemimpin mereka.

Tugas badan ini ialah membuat undang-undang, memelihara ketertiban umum dan menjadi perantara antara penguasa-penguasa Perancis dengan rakyat Mesir. Disinilah orang-orang Mesir dan umat Islam buat pertama kalinya mempunyai kontak langsung dengan peradaban Eropa yang baru lagi asing bagi mereka.

Mulanya rakyat menerima hal itu dengan diam dan tenang, tetapi lama-lama kian jelaslah bahwa semua itu dilakukan Perancis semata-mata bujukan agar

⁹Dr. Hasan Ibrahim Hasan, Islamic History and Culture From 632-1969, terjemahan, cet I Kota Kembang Jogjakarta 1989 halaman 204

penduduk Mesir tidak terganggu dan tidak memberontak. Setelah dirasakan kedudukannya kuat barulah tentara Napoleon itu menunjukkan sikap yang sebenarnya, sehingga kian hari rakyat semakin melawan.

Untuk menghadapi Napoleon inilah Otsmaniyah Turki mengirimkan Muhammad Ali Pasya. Dia memimpin pertempuran di Abukir pada 25 Juli 1799, tetapi dia menghadapi kekalahan yang berat. Dia dipanggil pulang ke Istambul untuk memimpin perang menghadapi Yunani.¹⁰

Kemudian dia kembali ke Mesir memimpin pasukan Albania dari Otsmaniyah Turki dan pada tahun 1801 ia berhasil mengusir Napoleon dari tanah Mesir maka terjadilah perebutan kekuasaan di Mesir, sebagaimana dikemukakan oleh Harun Nasution.

"Kaum mamluk, yang dahulu lari dikejar Napoleon kembali ke Kairo untuk memegang kekuasaan mereka yang lama. Dari Istambul datang pula pasya dengan tentara Usmani. Kedua golongan ini berusaha keras untuk merebut kekuasaan bagi pihaknya. Muhammad Ali mengambil sikap mengadu domba antara keduanya. Simpati rakyat Mesir yang menaruh rasa benci kepada kaum mamluk dapat diperolehnya. Pasukan yang dipimpinnya bukan terdiri dari orang-orang Turki, tetapi dari orang-orang Albania. Kedua unsur ini memperkuat kedudukannya untuk memasuki pertarungan merebut kekuasaan."¹¹

Atas keberhasilannya mengusir Perancis, menghalau kaum mamluk yang berusaha kembali ke Mesir, membersihkan pengaruh Turki Usmani, Muhammad Ali berhasil memperoleh simpati rakyat, maka oleh rakyat Mesir diangkatlah ia sebagai Gubernur Mesir pada tahun 1805 kendatipun tanpa menunggu persetujuan dari Turki Usmani di Istambul.

Setelah diangkat sebagai Gubernur Mesir banyak hal yang telah dilakukan oleh Mumammad Ali, kendatipun ia hanyalah seorang buta huruf, ia mengerti akan pentingnya arti pendidikan dan ilmu pengetahuan

¹⁰H. Zainal Abidin Ahmad, Ilmu Politik Islam V, Bulan Bintang, Jakarta 1979, halaman 112

¹¹Harun Nasution, op. cit., halaman 35

untuk kemajuan suatu Negara. Dalam hal ini ia banyak terpengaruh dengan hal-hal yang dibawa oleh ekspedisi Napoleon.

Untuk membantunya dalam bidang ilmu pengetahuan ini ia mendirikan Kementrian Pendidikan untuk pertama kalinya di Mesir. Ia membuka sekolah militer ditahun 1815, sekolah tehnik ditahun 1816, dan sekolah kedokteran di tahun 1827 yang gurunya didatangkan dari Barat, dan karena tak pandai berbahasa Arab, maka ceramah-ceramah mereka diterjemahkan oleh penerjemah-penerjemah Arab dan Turki. Selain dari mendatangkan ahli-ahli dari Eropa, ia juga mengirim siswa-siswa untuk belajar di sana. Dari sinilah persentuan budaya Barat dengan dunia Islam untuk pertama kalinya secara langsung.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abul Hasan A.H. An-nadawi :

"Penyerbuan Perancis dan tinggalnya pemerintahnya yang mengendalikan urusan selama suatu jangka waktu yang singkat dalam perhitungan zaman, tapi panjang mengingat besar pengaruh dan bekas-bekasnya secara luas, telah menyemaikan benih di bumi Mesir dan didalam otak Arab Islam. Timur dan Baratbertemu dan bergeseran di Mesir secara langsung, dan keduanya dihubungkan oleh misi-misi ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang dikirim oleh Muhammad Ali guna mengambil manfaat dari Barat, dari undang-undang dan ilmu pengetahuannya, serta untuk memajukan Mesir dalam perpacuan ilmu, pertukangan, keahlian dan pemerintahan, misi-misi mana membawa ke Mesir buah dan hasil peradaban Barat.¹²

Dari pertemuan Timur dan Barat inilah kelak akan melahirkan tokoh-tokoh pemikir Nasionalis Mesir kaliber dunia, seperti Syaid Jamaluddin Al-Afghani 1839-1897, Muhammad Abduh 1849-1905, Rasyid Rida 1865-1935 dan lain-lain yang pada akhirnya memunculkan pula pergerakan Nasional menentang Imperialisme Barat yang

¹²Abul Hasan A.H. An-Nadawi, Pertarungan Antara Alam Pikiran Islam Dengan Alam Pikiran Barat, PT Al-Maarif Bandung cet II 1983, halaman 102

dimotori oleh Irabi Pasya 1882 - 1911, Mustafa Kamil 1873-1908, Muhammad Farid Bey Ahmad Zaglul pasya 1857-1927 dan sebagainya yang pada akhirnya menghantarkan Mesir pada kemerdekaannya pada tahun 1922, walaupun Inggris baru mengakui kemerdekaannya pada tahun 1933.

B. BIOGRAFI ALI ABDUR RAZIQ

Ali Abdur Raziq dilahirkan di pedalaman propinsi Menia pada tahun 1888, dari keluarga feodal yang aktif dalam kegiatan politik. Ayahnya Hasan Abdur Raziq, seorang pasya besar yang mempunyai pengaruh dan memiliki tanah yang luas.¹³ Hasan Abdur Raziq pasya adalah seorang sahabat Muhammad Abdoh, kendati begitu Ali Abdur Raziq tidak sempat menjadi muridnya karena pada waktu itu ia masih kecil.

Bahwasanya Ali Abdur Raziq ini dibesarkan dari keluarga yang aktif dalam kegiatan politik, bahkan ayahnya Hasan Abdur Raziq pernah menjadi wakil ketua partai Rakyat (Hizb Al-Ummah) 1907. Dialah yang menyampaikan pidato pembukaan pada rapat raksasa yang diselenggarakan oleh partainya - suatu partai yang dibentuk sebagai tandingan Hizb Al-Wathani (Partai Nasional) yang memiliki hubungan erat dengan penjajah Inggris. Langkahnya ini dilanjutkan oleh anggota keluarganya dalam memimpin partai tersebut.

Setelah Revolusi 1919 di Mesir muncul partai baru yang menamakan dirinya Hizb Al-Ahrar Ad-Dusturiyyin (Partai Bebas Konstitusional), partai ini adalah kelanjutan dari Hizb Ummah yang mempunyai hubungan dekat dengan Inggris. Pendiri partai ini adalah Hasan (kecil) pasya Abdur Raziq, saudara Ali Abdur Raziq, Hasan saudara Ali Abdur Raziq ini,

¹³Ahmad Tafsir, Sebuah Pengantar buku Al-Islam Wa Ushul Al-Hukm, terjemahan Mizan Bandung 1965 halaman X

menjadi pejabat pada kantor (diwan) Sultan Husien, yang merupakan agen Inggris pada masa P.D.I. Ia terbunuh ketika keluar dari rapat dewan partai di kantor redaksi surat kabarnya pada bulan Oktober 1922. "Lantaran itu, Mahmud pasha Abdul Raziq, saudara Syeikh Ali Abdur Raziq yang kedua ditunjuk sebagai pucuk pimpinan partai tersebut dan sekaligus sebagai penentu garis kebijaksanaan politik partainya".¹⁴ Saudara Ali Abdur Raziq yang lain yaitu Mustafa Abdur Raziq, ia kurang menyenangi dunia politik sehingga ia lebih memilih dunia ilmu katimbang politik. Ia pernah menjadi menteri wakap dan sesudah itu menerima gelar pasha pula. Ia memperoleh status sosial yang terhormat dimata bangsa Mesir dan di akhir hayatnya ia ditunjuk sebagai "Syeikh Al-Azhar".

Ali Abdur Raziq belajar di Al-Azhar pada umur masih amat muda, sepuluh tahun, ia mempelajari hukum pada Syeikh Ahmad Abu Khatwah, sahabat Abduh. Ali selama satu atau dua tahun juga mengikuti perkuliahan di Al-Jamiah Al-Mishriyah. Diantara dosen asing di Universitas itu ialah Prof. Santilana yang memberikan kuliah sejarah filsafat. Setelah Ali Abdur Raziq memperoleh ijazah Alimiyyah dari Al-Azhar tahun 1911, tahun 1912 ia mulai mengajar di Universitas itu. Tetapi pada bagian kedua tahun 1912 ia berangkat ke Inggris untuk belajar di Universitas Oxford. Disana ia banyak membaca dan mempelajari ide-ide Barat,¹⁵ kadang-kadang sebagai bahan bacaannya ialah buku-buku politiknya Thomas Hobbes dan John Lock. Namun demikian yang langsung mempengaruhi pemikirannya ialah Muhammad Abduh.

¹⁴Dr. Dhiya' Ad-Din Ar-Rais, Al-Islam Wa Al-Khalifah Fi Al-Ashr Al-Hadits, terjemahan, Mizan Bandung 1989 halaman 25

¹⁵Harun Nasution, op. cit., halaman 84

Berbeda dengan keterangan Dhiya Al-Din Al-Rays yang mengatakan bahwa Ali Abdur Raziq selesai belajar dan memperoleh ijazah di Al-Azhar tahun 1911, kemudian tahun berikutnya ia ke Inggris untuk belajar ilmu politik dan ekonomi. Tetapi tidak jadi belajar disana, dan seiring dengan pecahnya Perang Dunia I ia kembali ke Mesir.¹⁶ Penjelasan ini kemungkinan besar tidak benar karena Dhiya Al-Din adalah seorang yang tidak setuju dengan pendapat Ali Abdur Raziq.

Sejak tahun 1915 diangkat menjadi Qadhi di beberapa Mahkamah Syariah di Mesir. Dalam suatu perdebatan menyusul peristiwa penghapusan kekhilafan pada tahun 1924 ia menampilkan sumbangan fikiran yang berjudul " Al-Islam Wa Ushul Al-Hukm " (Islam dan dasar-dasar pemerintahan) yang menyebabkan dia dikucilkan oleh Dewan Ulama Al-Azhar.

Dia dilarang memangku jabatan apapun dalam pemerintahan sehingga ia mengabdikan dirinya dalam Akademi Bahasa Arab di Kairo.¹⁷

Pendapat liberal yang diajukan oleh Ali Abdur Raziq tentang sistem pemerintahan mendapatkan kritik dan tantangan keras dari berbagai golongan umat Islam yang ada pada waktu itu. Tantangan yang terkeras datang dari Al-Azhar. Dalam rapat majelis Ulama Besar yang dihadiri oleh anggotanya diputuskan bahwa buku Ali Abdur Raziq itu mengandung pendapat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Pendapat yang demikian tidak mungkin dari seorang Islam, apalagi seorang ulama, ia tidak dapat diakui lagi sebagai seorang ulama, dan namanya dihapus dari daftar

¹⁶Dr. Dhiya Al-Din Al-Rays, *op.cit.*, halaman 25
¹⁷John J. Donohue dan John L. Esposito (ED)
 "Islam in Transition Muslim Perspective" terjemahan
 Machnun Husein, Islam dan Pembaharuan CV. Rajawali, Bulan
 Bintang, Jakarta 1982 halaman 39

Al-Azhar. Selanjutnya ia dipecat pula dari jabatan hakim agama yang dipegangnya.¹⁸

Kemudian ia memusatkan perhatiannya di bidang ilmu dan meninggalkan urusan politik, sehingga diakhir hidupnya ia diangkat kembali sebagai ulama Al-Azhar. Bahkan selanjutnya ia diangkat sebagai Menteri Waqaf, sebagaimana saudaranya, Mustafa Abdur Raziq yang juga menjadi Menteri Waqaf sebelumnya. ✓

Ketika buku "Islam Wa Ushul Al-Hukm" itu terbit, kecaman memang muncul dari beberapa kalangan. Baik di Mesir sendiri maupun berbagai negara-negara Islam lainnya. Penentang itu antara lain Rasyid Ridha murid terdekat dengan Muhammad Abduh, Syeikh Muhammad Al-Khidz Husain, seorang mufti besar perguruan tinggi Al-Azhar, dalam bukunya, Naqd kitab Al-Islam Wa Ushul Al-Hukm dan Syeikh Muhammad Al-Thahir bin Ashur, dalam bukunya Naqd Ilmi Li Kitab Al-Islam Wa Ushul Al-Hukm.¹⁹

Pada tahun tujuh puluhan terbit pula dua buah buku yang juga membahas tulisan Ali Abdur Raziq itu pertama buku Mabadi Nizam Al-Hukm Fi Al-Islam yang ditulis oleh Prof. Abdul Al-Hamid Mutawalli dan kedua buku Al-Islam Wa Al-Khilafah Fi Al-Asbr-Al-Hadist, ditulis oleh Prof. Muhammad Dhiya Al-Din Al-Rays.²⁰

Demikianlah nampak betapa besar tanggapan para ulama terhadap pendapat Ali Abdur Raziq, sehingga dengan berbagai cara, ulama menolak pendapatnya. Meskipun demikian akhirnya pendapat tersebut di akhir abad 20 ini, dalam beberapa segi banyak diikuti oleh ulama Islam.

¹⁸Harun Nasution, *op. cit.*, halaman 85

¹⁹Muhammad S. El Awa, On the Political System of Islamic State, terjemahan Anshari Thayib, Sistem Politik Dalam Pemerintahan Islam, PT Bina Ilmu, Surabaya 1983 halaman 44-45

²⁰i b i d., halaman 96

C. Timbulnya pemikiran Ali Abdur Raziq

Timbulnya pemikiran tentang khilafah yang dikemukakan oleh Ali Abdur Raziq tidaklah dapat dipisahkan dengan masalah penghapusan kekhilafahan di Turki yang dilakukan oleh Kemal Attaturk pada tahun 1924 atau satu tahun sebelum diterbitkannya buku tersebut, oleh sebab itu perlu kiranya di jelaskan hal-hal yang melatar belakangi dihapuskannya kekhilafahan oleh Kemal Attaturk.

Awal Maret 1924 Kemal Attaturk-Kepala Negara Turki menghapuskan kekhilafahan dari negeri ini, dan mendepak keluar khalifah terakhir yang ada saat itu, kendatipun ia sekedar sebagai lambang, yakni Sultan Abdul Majid II.

Akan tetapi oleh karena kekhilafahan itu bukan hanya semata-mata milik Turki, melainkan milik seluruh dunia Islam. Ia menjadi bagian dari warisan kaum muslimin, peninggalan sejarahnya dan lambang persatuan mereka. Ia adalah pucuk pimpinan kerohanian bagi bangsa-bangsa Islam yang terdapat di berbagai penjuru dunia. Kekhalifahan ini bukan sekedar lambang ataupun lebih dari itu telah berjalan lebih dari seribu tiga ratus tahun lamanya sejak kaum muslimin mencapai konsensus dan memilih Abu Bakar Ash Shiddiq sebagai khalifah Rasulallah SAW. Dialah khalifah pertama dalam sejarah Islam yang kemudian diikuti oleh khalifah kedua Al-Faruq Umar Bin Al-Khattab.

Demikianlah, maka bermunculan khalifah-khalifah disepanjang kurun waktu di berbagai negara hingga abad ke dua puluh. Jadi wajarlah bila kaum muslimin menaruh perhatian yang sangat besar terhadap kekhilafahan ini dan memikirkan masa depannya serta menunggu dengan penuh perhatian apa yang bakal terjadi pada masa-masa mendatang.

Menurut pendapat saya, demikian pendapat Dhiya-Ad-Din Al-Rays, penghapusan kekhilafahan

Utsmaniyah oleh Attaturk adalah karena situasi negara Turki pada masa terakhir itu yang diikuti oleh tindakan-tindakan politik sementara sultan yang sewenang-wenang semisal Sultan Abdul Hamid. Tambahan pula, dalam Perang Dunia I Turki mengalami kekalahan hebat walaupun hal itu bukan kesalahan khalifah Sultan Muhammad V yang memerintah sesudah Abdul Hamid. Ia tak lebih hanyalah seorang penguasa, sedangkan yang bertanggung jawab terhadap degradasi militer adalah partai (Jamiat Al-Ittihad Wa At-Taraqqi) yang mendominasi pemerintahan sepanjang Perang Dunia itu beberapa tahun sebelumnya. Namun pada penggal terakhir sesudah kekalahan itu, di saat Mustafa Kemal Attaturk membawa pasukan pembela tanah air menyongsong musuh dan membebaskan negeri mereka serta membalikkan kekalahan itu menjadi kemenangan. Pada saat itulah kekhalifahan yang berada ditangan Muhammad VI jatuh dibawah pengaruh para khalifah yang menduduki Istanbul dan memaksanya menentang perjuangan kaum Nasionalis dibawah pimpinan Kemal Attaturk.^{20A} Jadi wajarlah bila ia menjadi sasaran kebencian dan kemarahan. Dan disaat kemenangan penuh telah dicapai dan republik telah di proklamirkan, maka Attaturk tidak menemukan satu alasan apapun yang membenarkan adanya kekuasaan lain disamping dirinya, oleh karena itu ia segera memakzulkan khalifah yang pada hakekatnya tidak tahu menahu terhadap persoalan yang sebenarnya, yakni Abdul Majid II dan menghapuskan jabatan kekhalifahan dari negerinya. Itulah posisi atau kondisi yang ada di saat Kemal Attaturk memberlakukan penghapusan khalifah dari Turki pada tahun 1924.

Sekarang, marilah kita kembali ke Mesir dan melihat apa yang sedang terjadi disana sehubungan

^{20A} Dhiya Ad-Din Al-Rays, op.cit. halaman 27

dengan penghapusan kekhalifahan di Turki.

Berita penghapusan kekhalifahan di Turki itu merupakan peristiwa luar biasa yang amat menyakitkan seluruh negeri-negeri Islam, khususnya Mesir, yang saat itu menempati posisi terdepan dalam dunia Islam. Sebab disanalah " Al-Azhar Asy-Syarief " serta berbagai sekolah dan lembaga pendidikan lain yang mampu memelihara warisan Islam berada. Sementara itu, kekhalifahan yang telah berjalan lebih dari seribu tahun dalam kehidupan kaum muslimin, telah memberikan sistem terpadu yang mampu membuktikan kelestarian sejarah mereka, pun masa-masa kejayaan mereka yang mampu membela panji-panji Islam selalu menjadi bahan pembicaraan orang. Beberapa kali sudah mereka harus menghadapi kaum penjajah dan kekuatan Eropa yang rakus itu, dan kemenangan yang mereka peroleh adalah merupakan kehormatan tersendiri bagi mereka.

Satu-satunya tanggapan keagamaan yang otoritatif terhadap penghapusan kekhalifahan datang dari Mesir, dari sekelompok ulama, yang mengadakan sidang untuk membahas masalah tersebut, diketuai oleh Rektor Al-Azhar, Syeh Muhammad Abdul Fadhl Al-Jizawi, dan ketua Pengadilan Tinggi Agama, Muhammad Mustafa Al-Maraghi, dihadiri oleh wakil-wakil dari madzab hukum utama sunni, mereka mengemukakan pandangan yang mewajibkan dilestarikannya kekhalifahan yang didirikan di Mesir. Dalam situasi yang demikian itulah, tiba-tiba Syarif Husen, Raja Hijaz, memproklamkan diri sebagai khalifah kaum muslimin tanpa persetujuan maupun musyawarah lebih dulu dengan mereka. Semua kekuatan yang merasa berkepentingan dengan masalah ini, terutama orang-orang Mesir, tentu saja menolak mengakui kekhalifahan Raja Husain ini. Berbagai macam artikel yang berkenaan dengan masalah itu dipublikasikan dan berbagai penerbitan dan berbagai pertemuan diselenggarakan.

Para ulama Mesir yang mengadakan sidang pada tanggal 25 Maret 1925 berpendapat bahwa kekhalifahan Abdul Majid selama ini sama sekali tidak syah, kendatipun kini gelar kekhalifahan itu sendiri telah hilang dari tangannya sejalan dengan penghapusan yang diberlakukan oleh pemerintah Turki. Selanjutnya mereka juga menjelaskan mengenai keharusan yang mewajibkan adanya khalifah atau imam bagi segenap kaum muslimin, oleh sebab itu mereka menganggap bahwa perlu kiranya diselenggarakan muktamar keagamaan yang Islamis yang dihadiri oleh seluruh delegasi umat Islam guna membahas siapa yang berhak menangkan jabatan khalifah Islam ini. Dan hendaknya muktamar tersebut diselenggarakan di Mesir.

Maka dipersiapkanlah segala sesuatunya untuk mempersiapkan muktamar tersebut, baik di Mesir maupun diluar Mesir. Dalam suasana seperti itu orang-orang Mesir yang sebagian besar terdiri dari para ulama mengharapkan agar Raja Fuad dari Mesir terpilih dan bersedia menjadi khalifah bagi kaum muslimin.

Kendatipun muktamar tersebut berakhir dengan kegagalan karena masing-masing kelompok tidak dapat disatukan pandangannya mengenai siapa yang layak menjadi khalifah bagi kaum muslimin. Para peserta terbagi menjadi dalam tiga kelompok, kelompok pertama mempertahankan kepemimpinan Sultan Abdul Majid (Turki) yang sudah dilucuti oleh Mustafa Kamal dari segala kekuasaan, dan menghendaki dia dikembalikan kepada jabatan khalifah. Kelompok kedua mendesak Syarif Husein, yang pada tahun 1916 memberontak terhadap kekuasaan Turki dan menyatakan dirinya sebagai khalifah. Sedangkan kelompok yang ketiga, yang umumnya terdiri dari ulama Mesir, berusaha keras agar muktamar memutuskan Raja Fuad dari Mesir sebagai khalifah, namun sudah ada usaha-usaha dari kaum muslimin untuk melestarikan lembaga khalifah.

Perselisihan tiga kelompok tersebut tampaknya berpangkal pada masalah sulitnya menemukan orang yang tepat untuk dijadikan figur khalifah dan kota yang tepat untuk dijadikan ibukota kekhalifahan. Rasyid Ridha, salah seorang pemikir modern Mesir, yang juga masih menginginkan dilestarikannya lembaga kekhilafahan, tidak bisa menerima ketiga alasan yang dikemukakan oleh ketiga kelompok tersebut, tentang calon-calon yang diajukan sebagaimana yang dikemukakan oleh Hamid Enayat.

"Setelah meneliti gelanggang politik yang ada, Ridha mencoret nama calon yang paling berambisi untuk jabatan tersebut pada masanya, Syarief Hussien dari Hijaz, karena despotisme, kebutaan akan pengetahuan syariah, simpati pro-Inggris dan oposisinya terhadap paham pembaharuan. Calon-calon dari Turki juga dikeluarkannya daftar, karena waktu itu mereka menentang pemusatan semua kekuatan politik dan spiritual di tangan satu orang. Mengenai calon-calon dari Mesir Ridha bungkam. Hanya Imam Yahya dari Yaman saja yang memperoleh persetujuan karena penguasaannya atas hukum-hukum agama, integritas moral, kemampuan efisiensi, kesemimandiriannya secara politis dan keturunan suku Quraisy. Tetapi diakuinya bahwa sang Imam hanya bisa menjadi khalifah bila semua kaum Muslimin, pertama, jika rakyat Hijaz, Tihamah dan Najed sepakat untuk berbaiat kepadanya, dan keduanya, jika sang Imam sendiri bersedia mentaati aturan-aturan Ijtihad dengan memperkenankan semua kelompok Muslim untuk menjalankan ibadat-ibadat ritual mereka sesuai dengan ajaran madzab masing-masing"^{20B}

^{20B}Hamid Enayat, op. cit. halaman 115-116

Ditengah kondisi seperti itulah, buku Syeikh Ali Abdur Raziq terbit, tepatnya bulan April 1925 yang berjudul *Al-Islam Wa Ushul Al-Hukm* (Edisi Indonesia khalifah dan Pemerintahan dalam Islam, 1985, Pustaka, Bandung).

"Karya tulis Abdul Raziq itu dibagi dalam tiga bagian, dalam bagian pertama diuraikan tentang definisi khalifah atau lembaga khalifah, kemudian dipertanyakan tentang dasar anggapan bahwa mendirikan pemerintahan dengan pola khalifah itu bukanlah suatu keharusan untuk masa kini, dan bahkan kekhalifahan itu tidak ada dalam ajaran Islam baik dalam Al-Quran sunnah ataupun Ijma. Dalam bagian kedua diuraikan tentang pemerintahan dan Islam, tentang perbedaan risalah atau misi kenabian dengan pemerintahan, dan akhirnya kesimpulan bahwa risalah kenabian itu bukan pemerintahan dan bahwa agama itu bukan negara. Dalam bagian ketiga dan terakhir diuraikan tentang khalifah atau lembaga khalifah dan pemerintahan dalam lembaran sejarah.²¹

Sebagai akibat dari ide-idenya yang dituangkan dalam bukunya tersebut ia mendapatkan kritik dan kecaman dari berbagai pihak terutama dari para ulama yang masih menginginkan tetap dilestarikannya lembaga khalifah dalam dunia Islam. Kecaman terkeras adalah yang datang dari Al-Azhar yang pada akhirnya memutuskan untuk memberhentikannya dari jabatannya sebagai hakim dan dilarang menduduki jabatan pemerintahan.

Adapun mengenai pemikiran-pemikiran Ali Abdur Raziq dan seputar masalah kekhalifahan akan diuraikan dalam bab berikut ini.

²¹Munawir Sadzali, *op. cit.*, halaman 139-140 lihat juga Hamid Enayat, *Reaksi Politik Sunni Dan Syiah*, 1988, Pustaka Bandung, halaman 96-97